



**Judul** : Fungsi Legislasi DPR RI Tahun Ini Meningkatkan Tajam  
**Tanggal** : Kamis, 22 Desember 2022  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 5

## Fungsi Legislasi DPR RI Tahun Ini Meningkatkan Tajam



**S**epanjang tahun 2022 menjadi tahun tersibuk bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sejak Januari hingga Desember para wakil rakyat ini telah berhasil merampungkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

Sejken DPR RI Indra Iskandar mengatakan produk legislasi itu berasal dari Komisi Panitia Khusus (Pansus), Badan Legislasi (Balleg), dan Badan Anggaran (Banggar). Dia memaparkan, DPR menyelesaikan lebih dulu RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) oleh Pansus pada 18 Januari. Selanjutnya DPR terus bekerja merancang dan mensahkan UU, hingga yang teranyar disahkan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Data Sekretaris DPR mencatat, RUU yang disahkan menjadi UU pada 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 13 UU, dan pada tahun 2022 sebanyak 34 UU. Menurut Indra jumlah tersebut sangat signifikan mengingat DPR sangat mengedepankan kualitas daripada kuantitas.

Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023 sebanyak 39 RUU, dengan rincian 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD.

"Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah ditetapkan menjadi undang-undang adalah Undang-Undang KUHP. Negara kita sudah merdeka selama 77 tahun dan tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya sejak tahun 1963, sudah melakukan diskusi terhadap perubahan KUHP," kata Puan.

RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan

menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.

"Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis," kata cucu Proklamator tersebut.

Puan juga menegaskan, DPR RI mengapresiasi capaian realisasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2022 yang menunjukkan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan global.

Puan memaparkan bahwa APBN Tahun Anggaran 2022 juga telah menunjukkan kinerja yang baik dan mampu menopang kinerja ekonomi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi walaupun Indonesia berada pada situasi global yang penuh gejolak.

Dia mengingatkan Pemerintah harus terus mewaspadai dan memitigasi berbagai ketidakpastian dan risiko akibat tekanan dan risiko global maupun domestik yang terus bergerak dinamis.

DPR RI juga mengapresiasi telah diserahkan-nya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian/lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kata Puan, selain pengawasan reguler yang menjadi urusan setiap alat kelengkapan dewan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, antara lain Kejadian Luar Biasa (KLB) polio dan percepatan vaksinasi atipikal, penanganan bencana alam akibat cuaca ekstrem; penanganan bencana alam akibat cuaca ekstrem, dan; Permasalahan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian memberi perhatian juga kepada Persoalan blank spot siaran televisi analog serta pengadaan dan pendistribusian Set Top Box (STB) yang belum tepat sasaran; Penanganan atau penerbitan Over Dimension Over Load (ODOL) atau kelebihan dimensi-beban, dan; Persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru

dan tingginya harga bahan makanan pokok menjelang akhir tahun 2023.

"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterahkan rakyat," kata Puan.

### Kegiatan Diplomasi Parlemen:

1. Sidang Tahunan ke-30 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF-30) pada 26-29 Oktober 2022 di Bangkok.
2. Sidang AIPA-ASEAN Interface at the 40th and 41st ASEAN Summits pada tanggal 7-11 November 2022, di Phnom Penh, Cambodia.
3. Sidang 27th Session of the conference of the parties of United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27) pada tanggal 11-15 November 2022 di Sharm El-Sheikh, Mesir.
4. Sidang Executive Committee of the League of Parliamentarians for Al Quds pada tanggal 17-21 November 2022 di Istanbul, Turki.
5. Sidang Umum ke-43 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 20-25 November 2022, di Phnom Penh, Cambodia.

### Keberhasilan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Menuju Parlemen Modern

"Sepanjang tahun 2022 ini setjen DPR RI telah membuktikan keberhasilannya dengan meraih berbagai prestasi diantaranya, mendapatkan penghargaan wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB yang diberikan kepada Biro Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Pusdiklat.



**INDRA ISKANDAR**  
Sekretaris Jendral DPR

Keberhasilan lain yang diperoleh Setjen DPR RI adalah mendapatkan anugerah meritokrasi hasil (Penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari komisi aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kategori sangat baik dengan poin 345,5 yang diterima pada 8 Desember lalu di Jakarta, sementara tahun sebelumnya hanya dengan 292 poin dengan kategori baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa meritokrasi di dalam kesetiaan berjalan dengan baik. Sejken DPR RI Indra Iskandar menjelaskan penerapan meritokrasi ini melalui proses evaluasi semua karyawan ASN yang berlangsung secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan core values ASN yang Ber-AKHLAK.

Secara keseluruhan keberhasilan setjen DPR RI tahun ini telah meraih 18 penghargaan

diantaranya :

1. Sertifikat Indeks Keamanan Informasi dan Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Keamanan Siber dari BSSN.
2. Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik II Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
3. Penghargaan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Pajak Tahun 2021.
4. Perpustakaan DPR RI Raih Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
5. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB, diberikan kepada Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran Biro Kerjasama Siber Sektor Pemerintah pusat dari BSSN.
6. Penghargaan Juara III kegiatan Kesiapsiagaan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintah pusat dari BSSN.
7. Penghargaan Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
8. Peringkat tiga penghargaan BKN Award 2022 dengan Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, pada Non Kementerian Tipe Besar.
9. Penghargaan Digital Transformation di Indonesia Awards 2022 kategori Excellent Public Service Digitalization Initiatives and Superintendent yang diberikan MNC Group.
10. Penghargaan "Sonora Excellent Government Appreciation Award".
11. Anugerah IPRAHUMAS 2022 kategori Pranata Humas, sub Kategori Pranata Humas Pertama.
12. Penghargaan Bronze Winner dalam ajang Public Relations Indonesia Awards 2022, untuk Pameran Daring "Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia".
13. Penghargaan Juara Ketiga kategori "Utilisasi Barang Milik Negara" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
14. Anugerah Meritokrasi kriteria Sangat Memuaskan dengan nilai 344,45
15. Anugerah penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Informasi tahun 2022.
16. Penghargaan sebagai Best Star Survei Indeks BerAKHLAK (kolaboratif) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
17. Setjen DPR RI mendapatkan nilai A- atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari KemenpanRB terhadap layanan dukungan persidangan kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan.
18. Peringkat ke-2 Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja dari BKN.

▣ **Adi/Aris Kurniawan**

### Daftar sebagian RUU yang disahkan oleh DPR RI di tahun 2022

- RUU tentang Ibu Kota Negara disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022
- RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022
- RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan disahkan menjadi UU pada 15 Februari 2022
- RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan disahkan menjadi UU pada 15 Februari 2022
- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan menjadi UU KUHP pada 6 Desember 2022.
- RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU pada 12 April 2022
- RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022
- RUU tentang APBN Tahun 2022 disahkan menjadi UU pada 30 Sept 2022
- RUU tentang Provinsi Riau disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022
- RUU tentang Provinsi Jambi disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022